

BAB IV

ANALISIS STRATEGI GERAKAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA

4.1. Analisis Ideologi Reformis Konfederasi Serikat Pekerja

Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja kuat dipengaruhi oleh ideologi konfederasi, tatkala Orde Baru berkuasa organisasi buruh dipersempit dalam satu wadah bersifat tunggal, selain dipersempit organisasi buruh turut direduksi dengan mewajibkan Pancasila sebagai asas tunggal dan satu-satunya ideologi. Kelahiran KSPI tidak terlepas dari kebebasan berserikat dan berpendapat, sehingga Sosial Demokrat dipilih sebagai ideologi guna memperjuangkan kepentingan pekerja. KSPI menggunakan Ideologi Sosial Demokrat bertujuan mewujudkan negara sejahtera, ideologi tersebut diyakini memberikan kesetaraan sebagai mitra di tempat kerja dalam kapasitas mengambil kebijakan.

Di tingkat Pimpinan Unit Kerja KSPI mendidik anggota berlaku setara, hal tersebut mengingat pemimpin memiliki kepentingan yang sama mewakili kelompoknya, seorang Presdir berkepentingan mewakili perusahaan dalam mengambil kebijakan, sedangkan Ketua PUK mewakili anggota di tingkat pabrik dalam mengambil keputusan. Di tingkat Daerah KSPI menggunakan ideologi serupa dalam kerja-kerja konfederasi, namun berbeda di tingkat PUK KSPI Ciubros Farma menggunakan ideologi Pancasila sebagai landasan berjuang, mengingat dalam butir-butir pancasila terdapat Ketuhanan yang Maha Esa, Keadilan Sosial

dan Kemanusiaan yang selaras dengan cita-cita perjuangan kaum buruh, sehingga ideologi tersebut menjadi dasar pegangan di tingkat pabrik.

KSPSI di tingkat pusat dan Pimpinan Unit Kerja menggunakan ideologi Pancasila sebagaimana dirumuskan pendiri bangsa, pancasila yang dimaksudkan sesuai dengan cita-cita berdirinya negara, mengingat di dalamnya terdapat hak-hak dasar buruh yang digambarkan dalam bentuk pengupahan, jaminan kerja dan hak mengikuti kegiatan politik. Ideologi serupa digunakan pada level Pimpinan Unit Kerja PT. IGP KSPSI Daerah Istimewa Yogyakarta, ideologi tersebut dijadikan sebagai landasan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Terlihat bahwa ideologi yang digunakan Konfederasi Serikat Pekerja sebatas perjuangan normatif meliputi upah, kontrak kerja dan hak dasar di tingkat pabrik. Ideologi yang digunakan belum mengarah pada perjuangan ideologis sebagai bentuk antitesis dari kekuasaan borjuis yang menggunakan perangkat negara untuk mempertahankan kekuasaannya. Secara praktik Pancasila dan Sosial Demokrat menjadi pijakan Konfederasi Serikat Pekerja menitikberatkan pada keseimbangan dengan menghindari konflik, sedangkan perjuangannya dilakukan sebatas pemenuhan kebutuhan normatif pekerja, dengan demikian pemenuhan kebutuhan normatif buruh menjadi kunci perjuangan konfederasi meskipun belum memberikan perubahan menggantikan struktur kekuasaan.

Dalam pandangan Karl Marx perjuangan buruh tidak hanya perjuangan normatif, melainkan perjuangan ideologis yang menempatkan aksi kolektif melalui gerakan sosial politik berbasiskan kesadaran kelas pekerja, bentuk dari kesadaran kelas ialah kepemimpinan buruh dalam perubahan sosial politik dalam rangka

menghapus penghisapan manusia atas manusia. Perjuangan kelas lahir atas dasar keadaan sosial yang saling bertentangan satu sama lain, kaum penindas dan ditindas, kaum proletar dan borjuis yang tidak dapat dihindarkan atas perkembangan masyarakat. Capaian dari perjuangan kelas menggunakan jalan revolusi sosialis yakni mengubah sistem sosial secara utuh, perubahan tersebut dipimpin kaum buruh sekaligus mengantarkan buruh pada puncak kepemimpinan menggantikan kaum borjuis.

Ideologi Konfederasi Serikat Pekerja dituangkan melalui demonstrasi, mobilisasi massa dan mogok kerja, perjuangan tersebut menjadi rutinitas konfederasi menghadapi kasus ketenagakerjaan yang berbasiskan pada Ideologi Pancasila dan Sosial Demokrat guna mencapai kesejahteraan, namun perubahan yang diyakini masih sebatas perubahan upah, status kerja dan kebijakan merugikan pekerja, sehingga perspektif reformis melekat erat dalam perjuangan Konfederasi yang menempatkan partisipasi dalam kepentingan pekerja, sedangkan kebijakan pemerintah tidak dianggap masalah selama tidak berkaitan dengan PHK, pemangkasan upah dan kebijakan merugikan kaum buruh. Bagi ideologi reformis masalah sosial disebabkan oleh mentalitas dan nilai-nilai pekerja itu sendiri sehingga eksploitasi tenaga kerja dan pengambilan nilai lebih bukan penyebab utama.

Tabel 4. 1
Peta Paradigma

NO	Paradigma Reformis	
1.	Sebab-Sebab Masalah	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya Pendidikan - Tingginya Populasi Penduduk - Nilai-nilai Tradisional dalam masyarakat - Korupsi merajalela
2.	Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Produksi - Mengaktifkan struktur yang ada - Mengubah nilai-nilai masyarakat
3.	Program	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan teknis - Pengembangan masyarakat - Pengembangan bisnis kecil - Memberikan bantuan hukum
4.	Tipe Perubahan dan Asumsi	<ul style="list-style-type: none"> - Fungsionalisme/Keseimbangan
5.	Tipe Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipatif - Memiliki tanggungjawab bersama
6.	Tipe Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu masyarakat untuk menolong dirinya sendiri - Revolusi hijau - Pembangunan kelompok masyarakat
7.	Inspirasi	<ul style="list-style-type: none"> - Reformasi

Sumber: Fakih, M. Dalam Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Tahun 2010.

Paradigma reformis memandang perubahan sebagai bentuk keseimbangan antar sesama elemen guna terciptanya stabilitas untuk mempertahankan status kekuasaan, sedangkan bentuk perubahan sebatas pemenuhan kebutuhan normatif yang tidak pada perubahan sistem sosial dan struktur kekuasaan. Ideologi Konfederasi Serikat Pekerja belum mengarah pada sasaran perjuangan berbasiskan gagasan transformatif guna menciptakan perubahan sosial yang utuh. Paradigma transformatif melihat perubahan disebabkan oleh buruknya relasi produksi yang berujung pada krisis ekonomi dan kehancuran, sedangkan kekuasaan dilihat sebagai

inti dari struktur sosial, oleh karena itu diperlukan usaha dan kerja keras dengan menempatkan nilai-nilai dan gagasan konfederasi sebagai kunci guna mewujudkan kepentingan pekerja.

Tabel 4. 2
Peta Paradigma

NO	Paradigma Transformatif	
1.	Sebab-Sebab Masalah	- Penghisapan/Eksploitasi - Ketimpangan struktur - Hegemoni kapitalisme
2.	Sasaran	- Menentang eksploitasi - Membangun struktur ekonomi/politik baru - Kontra diskursus
3.	Program	- Penyadaran - Membangun ekonomi alternatif - Pengorganisasian masyarakat sipil/kaum buruh - Koperasi
4.	Tipe Perubahan dan Asumsi	- Kritik Struktural
5.	Tipe Kepemimpinan	- Fasilitator Partisipatif - Disiplin yang kuat
6.	Tipe Pelayanan	- <i>Land reform</i> - Pendidikan kritis
7.	Inspirasi	- Transformasi

Sumber: Fakhri, M. Dalam Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Tahun 2010.

Pada titik ini Konfederasi Serikat Pekerja berperan penting menempatkan masyarakat sipil sebagai agen perubahan, perubahan yang dimaksud didasari pada ideologi, kesadaran dan pendidikan guna mentransformasikan krisis ekonomi menjadi krisis umum. Dalam melakukan transformasi konfederasi tidak menjadikan ekonomi sebagai faktor utama, melainkan seluruh entitas di dalamnya sebagai faktor utama. Selain itu gagasan transformatif berupaya mencari jalan

melalui kegiatan pengorganisasian masyarakat sipil dan memberikan pendidikan kritis jangka panjang, sehingga perubahan sosial menempatkan masyarakat sebagai pusat perubahan yang memegang kendali atas sejarah dan pengetahuan.

4.2. Perbandingan Strategi Gerakan Konfederasi Serikat Pekerja

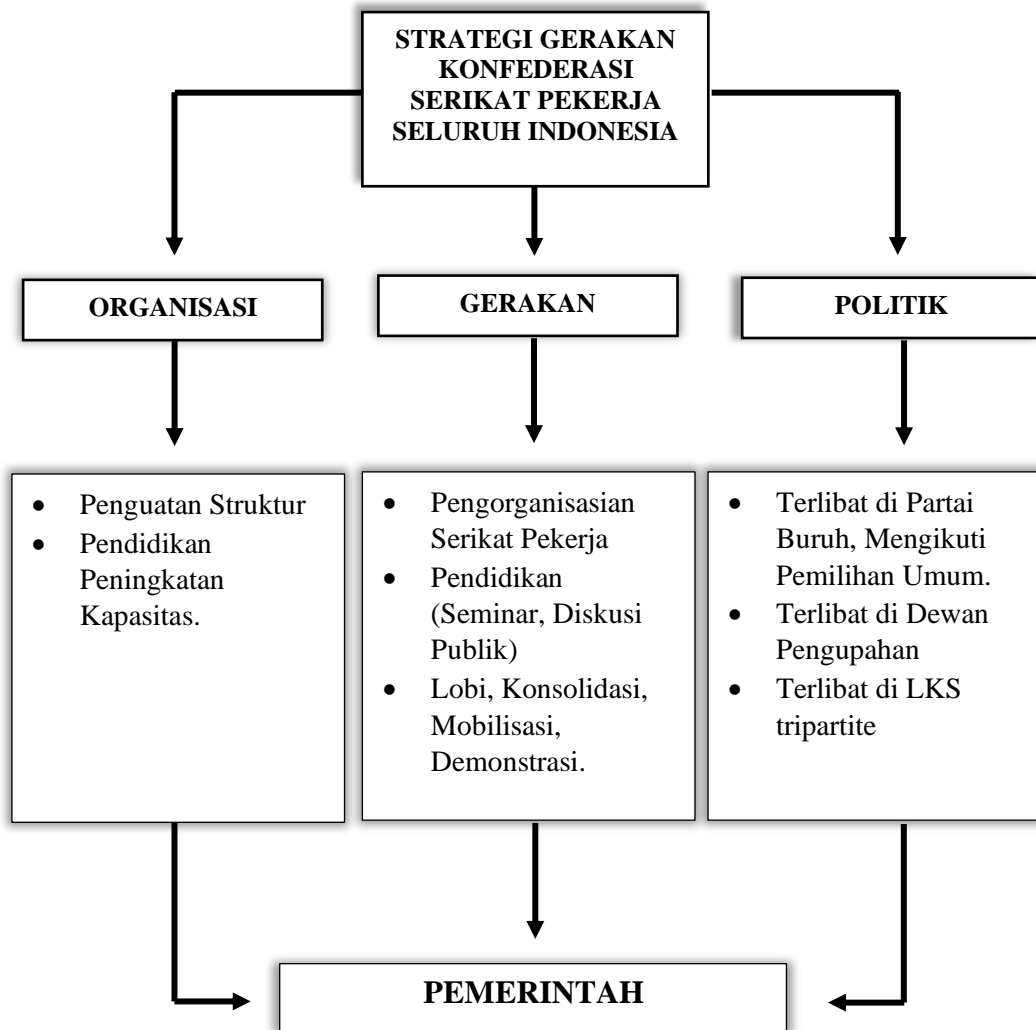
Sepanjang Orde Baru gerakan buruh direduksi dalam Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI), akibatnya gerakan buruh sebatas *representative group* dan *pressure group*. Pasca Orde Baru gerakan buruh bangkit mendirikan Serikat Pekerja atas dasar Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, kebijakan tersebut mendorong buruh berhimpun dalam konfederasi guna menolak kebijakan dianggap merugikan kaum buruh. Hal serupa dilakukan KSPI dan KSPSI menuntut kebijakan yang berpihak kepada kaum buruh, upaya dilakukan dengan menempatkan konfederasi sebagai kelompok kepentingan dituangkan melalui konsep, demonstrasi, mogok nasional dan berjuang menggunakan partai politik.

Dalam mewujudkan kepentingan KSPSI membagi strategi menjadi tiga bagian, pertama strategi organisasi dilakukan dengan penguatan struktur internal serikat pekerja melalui pendidikan, program tersebut guna meningkatkan kapasitas di bidang ketenagakerjaan meliputi isu Pemutusan Hubungan Kerja, isu nasional dan pendidikan manajemen serikat. Kedua strategi gerakan dilakukan dengan pengorganisasian serikat guna pembesaran organisasi, selanjutnya konfederasi melakukan demonstrasi membawa isu ketenagakerjaan yang diawali konsolidasi, diskusi publik dan mobilisasi massa.

Selain strategi gerakan dan organisasi, strategi politik turut dilakukan, konfederasi terlibat dalam partai Buruh dengan maksud mengikuti Pemilihan Umum, hal tersebut dilakukan guna mempengaruhi pengambilan kebijakan dan memperjuangkan kepentingan pekerja di tingkat parlemen. Selain itu strategi perjuangan dengan mengirim anggota di dewan pengupahan, Lembaga Kerja Sama *tripartite* dan lembaga Hubungan Industrial.

Di tingkat Dewan Pimpinan Daerah strategi perjuangan dilakukan serupa, KSPSI meningkatkan kapasitas organisasi melalui pendidikan anggota dan manajemen organisasi. Strategi perjuangan dilakukan dengan membentuk rencana demonstrasi menyikapi kebijakan negara yang diawali dengan membedah kasus dan melakukan dialog, sedangkan di tingkat Pimpinan Unit Kerja strategi perjuangan dilakukan dengan negosiasi yang diikuti oleh konsolidasi, demonstrasi dan mogok nasional, hal tersebut dilakukan guna memperjuangkan kepentingan pekerja di tingkat pabrik/Pimpinan Unit Kerja.

Bagan 4. 1
Strategi Gerakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

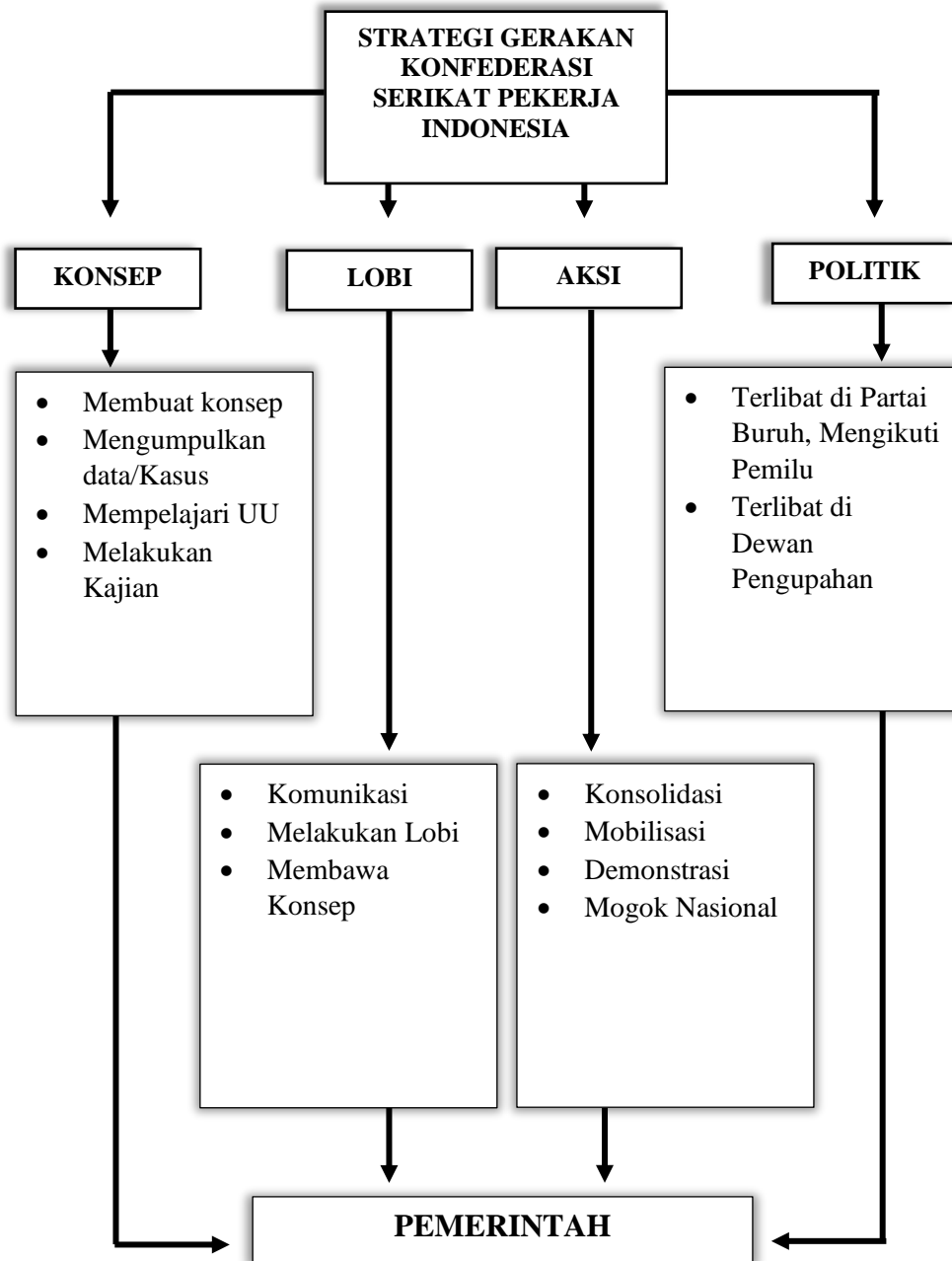


Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

Berbeda dengan KSPI yang menamai strategi gerakan Konsep, Lobi, Aksi dan Politik, strategi konsep dimaksudkan sesuatu yang ingin diraih terlebih dahulu di konsep dengan matang melalui pengumpulan data, mempelajari kasus dan membedah Undang-undang. Strategi lobi dilakukan kepada instansi terkait diikuti demonstrasi hingga mogok nasional, sedangkan strategi politik dengan melibatkan

konfederasi ke dalam Partai Buruh, selain itu konfederasi menempatkan anggota sebagai calon legislatif guna mempengaruhi pengambilan kebijakan di parlemen. Di tingkat DPD Jawa Tengah dan PUK menggunakan hal serupa, strategi ditempuh menggunakan strategi Konsep, Lobi, Aksi dan Politik sebagai langkah mewujudkan kepentingan konfederasi.

Bagan 4. 2
Strategi Gerakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

Dalam praktik lapangan terdapat perbedaan strategi gerakan yang digunakan KSPSI dan KSPI mewujudkan kepentingan pekerja, KSPSI membagi

tiga bagian dalam kerja-kerja konfederasi yaitu bagian Organisasi, Gerakan dan Politik, sedangkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggunakan strategi Konsep, Lobi, Aksi dan Politik dalam rangka mewujudkan kepentingan, meski demikian strategi gerakan Konfederasi Serikat Pekerja sebatas perjuangan normatif meliputi upah, kontrak kerja dan kebijakan lain yang dinilai merugikan kaum buruh.

Tabel 4. 3
Perbandingan Strategi Gerakan Konfederasi Serikat Pekerja

NO	Strategi Gerakan	
1	Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia	Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
	Organisasi: - Penguatan struktur internal - Pendidikan peningkatan kapasitas Gerakan: - Pengorganisasian - Pendidikan serikat pekerja (seminar, diskusi publik) - Konsolidasi - Mobilisasi - Demonstrasi Politik: - Terlibat di Partai Buruh - Mendorong anggota calon legislatif - Mendorong anggota di dewan pengupahan, LKS <i>tripartite</i>	Konsep: - Membuat konsep perjuangan melalui data kasus dan kajian - Mempelajari aturan berlaku Lobi: - Melakukan lobi kepada pemerintah Aksi: - Konsolidasi - Mobilisasi - Demonstrasi - Mogok nasional Politik: - Terlibat di Partai Buruh - Mengikuti pemilihan umum. - Terlibat di dewan pengupahan, LKS <i>tripartite</i>

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

Terlihat bahwa strategi gerakan konfederasi sebatas perjuangan normatif, gerakan konfederasi tidak berbasiskan pada perjuangan ideologis guna mengubah sistem sosial dan menggantikan struktur kekuasaan, selain itu strategi konfederasi tidak menempatkan aksi kolektif berbasis perjuangan kelas dan politik perlawanan, mengingat pertentangan sosial antar penguasa dan masyarakat sipil kian meruncing yang mengarah pada perubahan sistem sosial. Mengikuti Antonio Gramsci strategi gerakan sosial tidak hanya bertumpu pada satu elemen kaum buruh, melainkan perubahan sosial dipelopori seluruh elemen masyarakat sipil yang memiliki kepentingan yang sama, sehingga perubahan sosial diwujudkan melalui interaksi masyarakat dalam bingkai hegemoni kultural dan politik.

Menurut Gramsci anggapan pertentangan masyarakat sipil tidak dapat disederhanakan dalam *base structure*, mengingat setiap unsur pertentangan berperan penting menentukan peristiwa tersebut, sedangkan hegemoni merupakan bentuk dominasi masyarakat sipil untuk mengontrol kekuasaan, hal tersebut diikuti oleh kepemimpinan sebagai bentuk penaklukan terhadap kekuasaan, akhirnya hegemoni sebagai rantai kemenangan yang didapatkan melalui mekanisme konsensus, hegemoni juga turut menghindari penindasan terhadap kelompok sosial dan menentukan struktur pengetahuan dalam masyarakat.

Strategi gerakan konfederasi patutnya membekali organisasi dengan gagasan progresif, konfederasi turut menggali paradigma gerakan alternatif guna menciptakan struktur dan superstruktur yang memungkinkan masyarakat sebagai pengontrol perubahan sosial, dengan demikian masyarakat sipil menciptakan sejarah dengan memegang kendali perubahan sosial ekonomi dan politik. Strategi

gerakan konfederasi semestinya diperluas melalui program kerja lapangan, hal tersebut dijadikan sebagai lumbung pengorganisasian masyarakat dan sarana perubahan yang bertumpu pada kesadaran kelas masyarakat sipil, mengingat intensitas demonstrasi, mogok nasional belum menunjukkan gerakan transformatif, yakni menjadikan masyarakat sipil sebagai pusat perubahan dan memegang kendali atas sejarah dan pengetahuan.

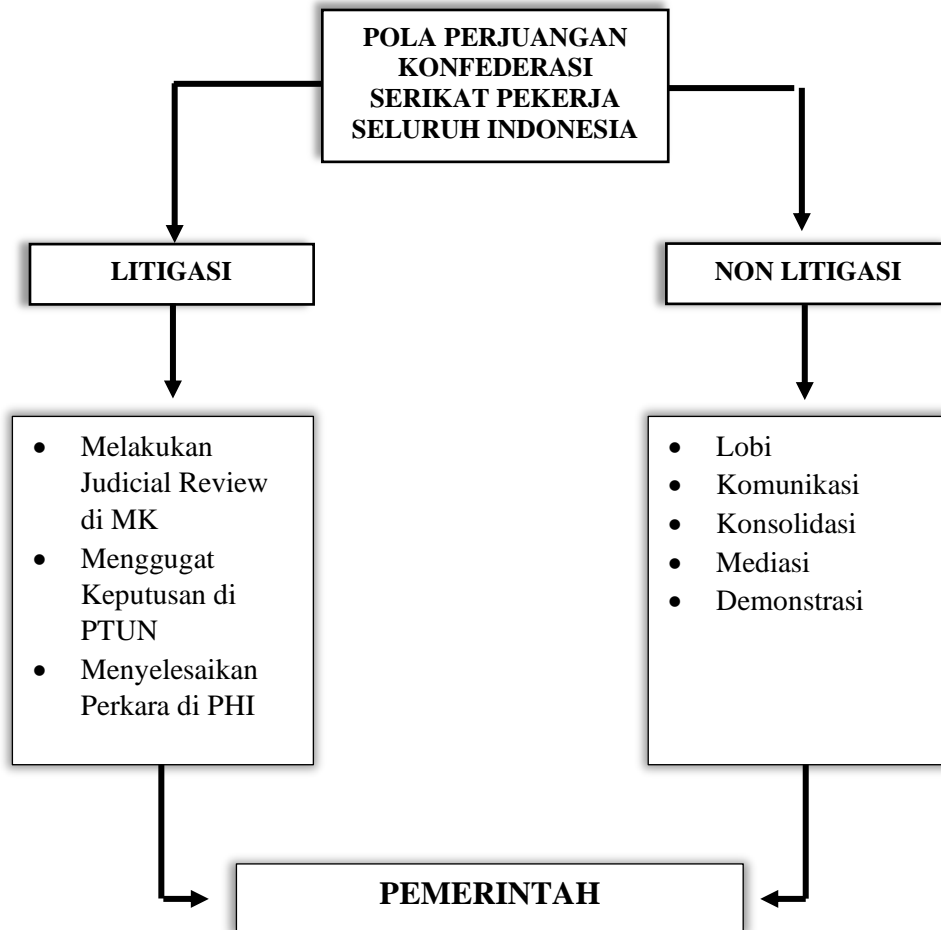
4.3. Perjuangan Litigasi dan Non Litigasi

Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja terbilang masif, dalam berjuang konfederasi tidak sebatas menggunakan pola litigasi dengan menggugat peraturan di Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara, di samping litigasi pola non litigasi digunakan dengan menempatkan konfederasi sebagai kelompok penekan dituangkan dalam komunikasi, demonstrasi, dan mogok nasional. Di tingkat pusat pola perjuangan KSPSI mengutamakan komunikasi dalam penyelesaian kasus normatif, tatkala terjadi Pemutusan Hubungan Kerja DPP KSPSI membangun komunikasi dengan pihak perusahaan, tidak hanya itu KSPSI turut mendorong pemerintah menerbitkan kebijakan yang melindungi pekerja.

Di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta KSPSI menggunakan pola litigasi dan non litigasi, pola tersebut dilakukan bersamaan melalui advokasi pada dinas ketenagakerjaan dan Pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan untuk menyikapi kebijakan lebih luas KSPSI menggunakan pola non litigasi, upaya tersebut melalui konsolidasi dan demonstrasi dengan memosisikan konfederasi sebagai kelompok penekan, hal serupa turut diikuti PUK PT. IGP KSPSI DIY dengan negosiasi dan demonstrasi dalam menyelesaikan persoalan normatif tingkat pabrik.

Bagan 4.3

Pola Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

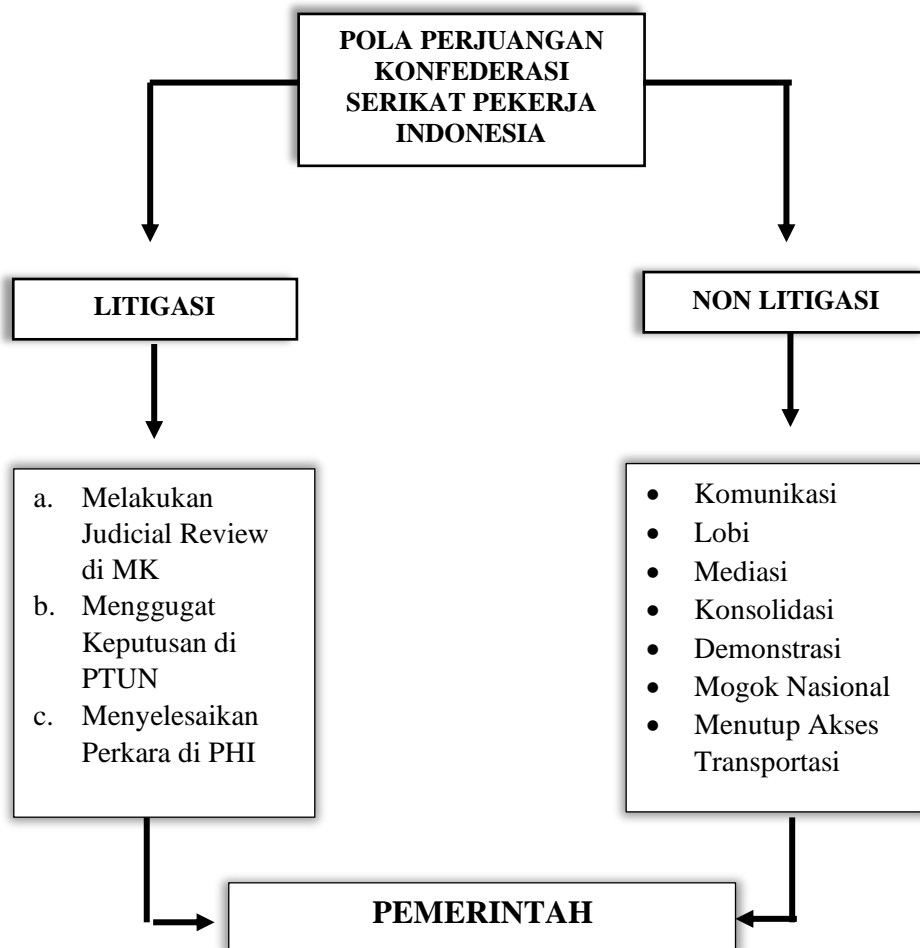


Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

Pola litigasi dan non litigasi turut ditempuh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dalam menghadapi pengupahan DPP KSPI menggunakan pola non litigasi sebagai kelompok kepentingan melakukan demonstrasi dan mobilisasi di kawasan industri strategis. Selain mogok nasional upaya menutup akses transportasi turut dilakukan guna menekan pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia, sedangkan di Jawa Tengah perjuangan KSPI menempuh dua jalur

bersamaan yaitu litigasi dan non litigasi, DPD KSPSI melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang diikuti demonstrasi di instansi pemerintah terkait. Di tingkat PUK PT. Ciubros Farma menggunakan pola serupa melalui litigasi dan non litigasi, pola tersebut dilakukan dengan negosiasi (*bipartite*, *tripartite*) dan demonstrasi menuntut upah lembur.

Bagan 4. 4
Pola Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

Terlihat bahwa perjuangan KSPSI dan KSPI menggunakan pola litigasi dengan menempuh jalur konstitusi melalui lembaga peradilan, selain itu pola non

litigasi ditempuh melalui demonstrasi, mobilisasi dan mogok nasional dalam rangka mewujudkan kepentingan normatif di tingkat pabrik. Mengikuti Sidney Tarrow gerakan sosial sebagai tindakan kolektif oleh orang yang memiliki kesamaan kepentingan dengan melakukan interaksi berkelanjutan kepada elit, maupun otoritas guna mencapai perubahan, sedangkan tujuan gerakan sosial dicapai melalui pola aksi kolektif guna memperebutkan sumber daya. Menurut Sidney Tarrow gerakan sosial pada dasarnya mendapatkan pengaruh dengan memanfaatkan komunikasi, dengan demikian gerakan yang relatif kecil dapat menarik perhatian, meningkatkan reputasi dan mendapat legitimasi dari kekuasaan.

Pola gerakan melalui demonstrasi, mobilisasi dan kampanye merupakan rangkaian dari gerakan perlawanan, hal tersebut dilakukan berdasarkan *collective claims* dan ditunjukkan kepada pihak tertentu guna mempengaruhi kebijakan. Selain itu gerakan sosial masyarakat sebagai partisipasi di ruang politik, pada akhirnya gerakan tersebut berhubungan dengan organisasi maupun isu liberalisme berubah menjadi gerakan politik dan sosial. Sidney Tarrow mengidentifikasi, gerakan sosial sebagai bentuk perlawanan menentang elit, dan sistem sistem sosial, selain itu gerakan sosial didasari atas kesamaan identitas dan tindakan perlawanan dalam bentuk sosial, sedangkan gerakan dalam bentuk mogok kerja dan unjuk rasa merupakan akibat dari tuntutan yang diabaikan hingga melahirkan pertentangan.

Pola gerakan yang dilakukan Konfederasi Serikat Pekerja terbilang masif dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mendapatkan pengaruh dan legitimasi, meski demikian pola perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja belum memberikan pukulan hebat kepada kekuasaan dengan maksud

mewujudkan cita-cita masyarakat sipil secara luas, melainkan gerakan sebatas perjuangan normatif sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan anggota di tingkat pabrik. Pola perjuangan semestinya didesain dengan perjuangan terorganisir dengan tujuan yang strategis berdasarkan metodologi yang diformulasikan atas keadaan masyarakat sipil, sehingga pola gerakan menjadi gerakan kontradiskursus sebagai antitesis hegemoni kekuasaan.

Seperti diketahui praktik kekuasaan melalui hegemoni kultural dan politik sangat masif, kekuasaan menghadirkan cara pandang baru melalui diskursus yang sistematis dan didukung oleh perangkat kekuasaan, hal tersebut dilakukan guna mengaburkan cara pandang masyarakat, sehingga penderitaan dan kesengsaraan dalam hidup dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sipil. Keadaan demikian membutuhkan pola perjuangan inovatif, selain pola gerakan litigasi dan non litigasi konfederasi menghadirkan pola gerakan jangka panjang sebagai upaya kontradiskursus yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat.

Kontradiskursus berperan penting melalui pendidikan berbasis kelas, upaya tersebut sebagai *counter* hegemoni kekuasaan dengan meningkatkan dominasi masyarakat sipil, selain itu kontradiskursus sebagai upaya mengontrol kekuasaan dan diikuti oleh kepemimpinan masyarakat yang mengarah pada penguasaan lembaga-lembaga negara, dengan demikian perjuangan masyarakat sipil dapat memberikan pukulan hebat kepada kekuasaan, sehingga perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja dapat diwujudkan.

4.4. Posisi Oposisi dan Mitra Organisasi

Dalam memperjuangkan kepentingan konfederasi memiliki posisi yang dinamis kepada pemerintah, hal tersebut dilihat dari kedudukan konfederasi di tingkat perusahaan, dalam hubungan industrial kedudukan konfederasi dan pemerintah ditempatkan sebagai mitra organisasi yang setara, mengingat pemerintah sebagai pembuat kebijakan sedangkan konfederasi dan pengusaha sebagai pelaksana kebijakan, meski demikian kebijakan pengupahan dan jaminan sosial mendapatkan penolakan konfederasi, sehingga posisi konfederasi terbilang dinamis dan berbalik arah sebagai kelompok penekan.

Di tingkat pusat KSPSI berposisi sebagai mitra organisasi yang setara kepada pemerintah, posisi tersebut berpegang teguh pada hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan guna mencapai perubahan dan perbaikan di tingkat perusahaan. Di samping itu DPP KSPSI mendorong terbitnya aturan yang melindungi buruh dan pengawasan di tingkat perusahaan, mengingat kondisi kerja kerap diabaikan. Di tingkat DPD KSPSI DIY memiliki posisi serupa, pemerintah ditempatkan sebagai mitra organisasi yang setara dalam hubungan industrial,

Selain sebagai mitra setara, DPD KSPSI DIY berposisi sebagai kelompok pendorong terbitnya aturan yang melindungi pekerja, meski demikian posisi konfederasi berubah sebagai kelompok penekan merespons kebijakan dinilai merugikan pekerja, sikap tersebut dituangkan dalam bentuk perlawanan gerakan sosial konfederasi. Berbeda dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI memosisikan konfederasi sebagai kelompok yang tanggung jawab kepada masyarakat, sebagai gerakan sosial KSPI menyampaikan gagasan guna mencapai

perubahan dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai dasar tuntutan, sikap demikian terlihat dalam sikap DPP KSPI merespons kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat dan pekerja.

Di tingkat DPD KSPI Jawa Tengah posisi konfederasi sangat dinamis, KSPI berposisi sebagai kelompok sosial yang konfrontasi kepada kebijakan yang merugikan pekerja, sebaliknya posisi konfederasi mendukung kebijakan yang mementingkan pekerja. Dalam menaikkan upah, KSPI mendukung penuh kebijakan pemerintah, posisi tersebut searah dengan PUK PT. Cuibros Farma yang bersinergi mendukung pemerintah, sebaliknya tatkala kebijakan merugikan pekerja maka posisinya sebagai kelompok penekan pemerintah.

Terlihat bahwa posisi konfederasi sebagai mitra organisasi berfungsi menciptakan hubungan harmonis, dinamis dan keadilan, selain sebagai mitra, posisi konfederasi dapat berbalik arah sebagai penekan kebijakan yang dinilai merugikan pekerja, meski demikian upaya konfederasi bersifat momentum berdasarkan kebijakan pemerintah. Posisi Konfederasi belum mengarah pada kelompok oposisi yang mengontrol pemerintah yang dituangkan dalam politik perlawanan pekerja guna menggantikan sistem sosial, sehingga pengambilan nilai lebih borjuasi kepada proletar dapat dihilangkan.

Sebagai oposisi sikap konfederasi dalam demonstrasi, mogok nasional terbilang konsisten, meski demikian posisi tersebut sebatas merespons kebijakan normatif. Gerakan konfederasi patut didasari pada program yang menghadirkan kesadaran kelas pekerja, upaya tersebut sebagai kontradiskursus terhadap kekuasaan dan membangun semangat oposisi untuk perubahan sosial. Modifikasi

posisi konfederasi menjadi kebutuhan utama, mengingat posisi konfederasi sebagai mitra organisasi cenderung bertentangan, di lain sisi pemerintah menciptakan hubungan harmonis melalui bantuan kreatif sangat mempengaruhi sikap dan posisi konfederasi.

Pada dasarnya konfederasi menolong buruh atas motivasi baik, namun terkait kemiskinan dan kesengsaraan bukan menjadi pertanyaan penting disebabkan oleh sistem sosial kekuasaan. Konfederasi selayaknya berposisi sebagai oposisi bertujuan mengubah struktur dan superstruktur yang sebelumnya menganggangi kepentingan masyarakat, dengan demikian sikap tegas konfederasi berpengaruh mewujudkan kepentingan masyarakat sipil. Selain itu posisi oposisi memungkinkan masyarakat sipil mengontrol perubahan sosial, sehingga masyarakat menciptakan jalan demokrasi dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, ekonomi dan politik.

4.5. Refleksi Gerakan Konfederasi Serikat Pekerja

Perjuangan Konfederasi tidak berjalan mulus, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial konfederasi mendapat hambatan melalui intervensi kekuasaan, selain hambatan perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja memetik rangkaian keberhasilan, hal tersebut diwujudkan melalui kenaikan upah minimum, hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), selain itu konfederasi berhasil merumuskan Perjanjian Kerja Bersama yang menguntungkan pekerja.

Pada era Susilo Bambang Yudhoyono KSPSI memetik keberhasilan, wujud dari keberhasilan ditetapkan jaminan kesehatan, kenaikan upah dan meningkatnya kesejahteraan pekerja, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari konsep yang matang

dimiliki pekerja. Selain konsep, kesolidan pekerja menjadi faktor penting dalam demonstrasi yang didukung penuh dari tingkat pusat hingga daerah. Sebaliknya kehadiran Undang-undang Cipta Kerja dan deretan kebijakan lain menjadi kegagalan pekerja, mengingat kebijakan tersebut tidak dapat dibendunginya Konfederasi Serikat Pekerja, kemudian itu polarisasi serikat pekerja kian masif perpecahan serikat buruh tidak terhindarkan, sehingga upaya penyatuan pekerja sulid diwujudkan.

Di tingkat daerah KSPSI DIY telah memetik keberhasilan, meskipun dalam tingkat berbeda pemenuhan hak normatif berhasil diwujudkan dalam bentuk koperasi buruh, sedangkan kegagalan meliputi kontrak kerja, outsourcing dan formula pengupahan tidak terlepas dari hambatan struktural, mengingat kebijakan tersebut telah diatur dalam fleksibilitas tenaga kerja, sehingga pekerja terhitung kecil berserikat dan mudah mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja. Hal serupa dialami PUK PT. IGP KSPSI DIY menemui kegagalan akibat hambatan struktural, selain itu aturan yang tidak berpihak dan perpecahan serikat buruh menjadi kegagalan PUK.

Di tingkat pusat KSPI terhitung konsistensi memperjuangkan BPJS Kesehatan dan upah sektoral, bentuk konsistensi perjuangan dimulai sejak tahun 2004 dan diwujudkan pada 2007. Di samping keberhasilan terdapat kegagalan akibat lajunya Undang-undang Omnibus Law, hal tersebut tidak terlepas dari polarisasi gerakan buruh, penetrasi oligarki dan intervensi pemerintah. Di tingkat daerah KSPI Jawa Tengah memetik keberhasilan, rangkaian keberhasilan diwujudkan melalui kesejahteraan pekerja, skala upah per tahun dan berhasil

membentuk Perjanjian Kerja Bersama, keberhasilan tersebut dipengaruhi kesadaran personal anggota dalam berjuang.

Selain itu kegagalan didapati tidak terlepas dari intervensi pemerintah pusat, dalam dinamikanya keputusan pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat, sehingga dalam perjuangan penetapan upah cenderung mendapat hambatan. Di tingkat PUK PT. Ciubros Farma memetik keberhasilan dengan menaikkan upah sebesar 6%, mengingat kenaikan upah melampaui ketetapan pemerintah, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari semangat dan solidaritas anggota melakukan demonstrasi.

Perjuangan konfederasi terlihat konsisten dengan kesolidan anggota menjadi kunci keberhasilan, meski terbilang kecil upaya pemenuhan kebutuhan dapat diraih, kenaikan upah, jaminan kesehatan dan hak pekerja dapat dipetik meski penetrasi oligarki semakin masif, selain itu intervensi kekuasaan dapat dilalui dalam pemenuhan kebutuhan normatif. Tatkala menghadapi neo liberalisme konfederasi cenderung dirugikan, hal tersebut diwujudkan dalam perdagangan pasar bebas yang berimbas pada pemangkasan tenaga kerja, tidak hanya itu pemotongan upah menjadi musuh konfederasi, meski penuh keterbatasan konfederasi memetik keberhasilan dikarenakan oleh tekanan demonstrasi yang masif dan kesolidan anggota dalam mogok nasional, sehingga upaya menyelamatkan pekerja di tingkat pabrik dapat terwujud.

Selain keberhasilan terdapat kegagalan menjadi refleksi penting bagi konfederasi, sejauh ini konfederasi dinilai gagal memenuhi kebutuhan masyarakat sipil. Sejatinya masyarakat sipil sebagai pemeran utama perubahan sosial telah di

alienasi, mengingat ideologi konfederasi yang secara praktik cenderung reformis guna menjaga keharmonisan. Sejak awal masyarakat sipil seharusnya mendapatkan hak sebagai warga negara, namun kenyataannya masyarakat sipil justru dimarginalkan dalam hubungan ekonomi dan politik, masyarakat sipil seharusnya menjadi subjek perubahan sosial telah menjadi objek atas hegemoni dan dis kursus kekuasaan.

Tanpa disadari kekuasaan telah mengontrol masyarakat sipil baik melalui paksaan maupun pengetahuan, sehingga dengan sukarela menerima kenyataan sosial, ekonomi dan politik. Dalam jangka panjang alienasi dan subordinasi masyarakat sipil disadari oleh konfederasi, upaya dilakukan melalui pengaburan gagasan dan gerakan reformis yang tidak terlepas dari campur tangan kekuasaan. Di samping itu penetrasi oligarki dan intervensi kekuasaan guna memecah gerakan terus dilakukan, sehingga upaya perubahan sosial secara utuh sulit diwujudkan.

Tabel 4. 4
Perbandingan Hasil Penelitian Konfederasi Serikat Pekerja

No	Konfederasi Serikat Pekerja	Ideologi	Strategi Perjuangan	Pola Perjuangan	Posisi Konfederasi Terhadap Pemerintah	Refleksi Keberhasilan dan Kegagalan
1.	Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia	Menggunakan ideologi Pancasila	<p>Organisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan struktur Internal melalui pendidikan peningkatan kapasitas, <p>Gerakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengorganisasian dan pendidikan serikat Pekerja, melakukan seminar, diskusi publik, konsolidasi, lobi, mobilisasi dan demonstrasi <p>Politik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlibat dalam partai Buruh, mendorong anggota menjadi Calon legislatif di pemilihan umum untuk mempengaruhi kebijakan di parlemen - Mendorong anggota di dewan pengupahan, LKS <i>Tripartite</i>. 	<p>1. Litigasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Konstitusi, menggugat keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan menyelesaikan perselisihan pekerja di Pengadilan Hubungan Industrial <p>2. Non Litigasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan konsolidasi, demonstrasi, lobi, mediasi dan membangun komunikasi, 	<p>1. Sebagai mitra organisasi yang setara dan bersinergi di tingkat hubungan industrial</p> <p>2. Sebagai kelompok penekan pemerintah dengan mendorong pemerintah menerbitkan peraturan yang berpihak kepada pekerja</p>	<p>1. Keberhasilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjuangan dilakukan dengan kematangan konsep - Kesolidan anggota melakukan aksi se-nasional. - Terdapat persatuan buruh di tingkat lokal <p>2. Kegagalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya polarisasi gerakan buruh - Terjadinya perpecahan gerakan buruh - Belum adanya persatuan untuk seluruh kaum buruh di Indonesia

						- Terdapat hambatan struktural melalui peraturan yang tidak berpihak kepada pekerja
2.	Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> Di tingkat DPP menggunakan Sosial Demokrat Di tingkat PUK Ciubros Farma menggunakan Pancasila 	<ol style="list-style-type: none"> Konsep: <ul style="list-style-type: none"> Membuat konsep perjuangan dengan mengumpulkan data kasus. Mempelajari undang-undang/peraturan terkait dan melakukan kajian Lobi: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan lobi kepada instansi terkait dengan membawa konsep Aksi: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan konsolidasi, mobilisasi, demonstrasi, mogok nasional. Politik: <ul style="list-style-type: none"> Terlibat dalam partai Buruh dan mendorong anggota mengikuti pemilihan umum untuk mempengaruhi kebijakan di parlemen 	<ol style="list-style-type: none"> Litigasi: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Konstitusi, menggugat keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan menyelesaikan perselisihan pekerja di Pengadilan Hubungan Industrial Non Litigasi: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan konsolidasi, demonstrasi, lobi, mediasi dan membangun komunikasi, 	<ol style="list-style-type: none"> Sebagai mitra organisasi dalam hubungan industrial Sebagai kelompok sosial yang berkonfrontasi kepada pemerintah terkait kebijakan yang merugikan pekerja dan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Keberhasilan: <ul style="list-style-type: none"> Perjuangan yang konsisten, istikamah Adanya kesadaran personal anggota. Semangat dan solidaritas dalam organisasi Kegagalan: <ul style="list-style-type: none"> Terjadinya polarisasi serikat pekerja. Penetrasi oligarki yang masif Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat Adanya arogansi pemerintah